

## INKLUSI KEUANGAN DAN PENYALURAN KREDIT UMKM DI JAWA TENGAH

Astiwi Indriani<sup>1</sup>  
Prasetiono<sup>2</sup>  
Shoimatul Fitria<sup>3</sup>

Departemen Manajemen, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas  
Diponegoro<sup>1,2,3</sup>

Email : astiwiindriani@lecturer.undip.ac.id

### Abstract

*Financial inclusion is currently a concern of the world and particularly the nation of Indonesia. Financial inclusion is expected to be able to provide access to financial services to the public. Banking financial services through lending can certainly support MSMEs in running their business. This investigation expects to examine the dimensions of financial inclusion, in particular the dimension of access and use, through indicators of demographic branch penetration, geographic ATM penetration, and Credit accounts per capita on the amount of MSME credit in Central Java. The sample in this research is using total sampling method. The sample used is 35 districts and cities in Central Java in 2011-2016. Data analysis used multiple linear regression analysis and classical assumption test. The outcomes showed that the demographic ATM penetration and credit accounts per capita had a significant positive effect on MSME credit, while the geographic branch penetration variable was not in accordance with the proposed hypothesis where geographic branch penetration had a negative and insignificant effect on MSME credit.*

*Keywords : Financial Inclusion, Demographic Branch Penetration, Geographic ATM Penetration, Credit Accounts per Capita, MSME Credit*

## PENDAHULUAN

Financial Inclusion (inklusi keuangan) telah menjadi perhatian bagi negara-negara didunia dan negara Indonesia pada khususnya. Inklusi keuangan diharapkan mampu memberikan akses layanan keuangan kepada masyarakat. Beberapa Negara telah mengakui bahwa keuangan inklusif memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi dan pengetasan kemiskinan. Namun, belum ada definisi global yang menjelaskan apa sebenarnya inklusi keuangan itu sendiri (Sanjaya dan Nursechafia, 2016).

Inklusi keuangan dan eksklusi keuangan merupakan hal saling yang bertentangan, jika inklusi keuangan terkait dengan bagaimana masyarakat menjadi maju karena mendapatkan akses dari sektor keuangan, sebaliknya eksklusi keuangan justru menjadikan masyarakat menjadi miskin dimana masyarakat tidak mampu mengakses manfaat dari sektor keuangan dan memberikan kerugian kepada masyarakat karena mereka kurang mendapatkan akses, jaminan, riwayat kredit dan jaringan (leyson & Thrift, 1995).

Dalam Inklusi keuangan ada tiga dimensi inklusi keuangan yang perlu diketahui yaitu out reach (access), usage dan quality. Dimensi di luar jangkauan (out reach) menjelaskan mengenai sejauh mana konsumen atau nasabah mampu menjangkau layanan jasa keuangan. Dimensi manfaat (usage) untuk melihat sejauh mana kegunaan sistem keuangan seperti mesin ATM (Automatic Teller Machine) kantor cabang bank, deposan rumah tangga dan peminjam. Sedangkan dimensi kualitas (quality) menunjukkan tingkatan kualitas produk-produk keuangan guna memenuhi kebutuhan masyarakat (Sanjaya dan Nursechafia, 2016). Sedangkan menurut Beck et al (2007) dalam Chakravarty & Pal (2010) menyebutkan bahwa ada 8 indikator inklusi keuangan antara lain : Geographic branch penetration, demographic branch

penetration, geographic ATM penetration, demographic ATM penetration, credit accounts per capita, credit-income ratio, deposits accounts per capita dan deposit-income ratio. Indikator (1) sampai dengan (4) mengukur jangkauan (out reach) sektor keuangan dapat mengakses layanan bank secara fisik. Sedangkan indikator (5) sampai dengan (8) mengukur penggunaan jasa keuangan perbankan.

Berdasarkan data world bank (2014) inklusi keuangan Indonesia sebesar 36% lebih rendah dibandingkan dengan negara Malaysia dan Thailand masing-masing sebesar 81% dan 78%. Rendahnya inklusi keuangan di Indonesia menunjukkan bahwa banyak masyarakat Indonesia yang belum mampu mengakses produk-produk keuangan perbankan. Walaupun demikian, berdasarkan data yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan pada Survei Nasional Literasi dan inklusi keuangan tahun 2016, menunjukkan peningkatan indeks inklusi keuangan dari tahun 2013 ke 2016. Dimana pada tahun 2013 Indeks inklusi keuangan Indonesia 59,75% dan mengalami peningkatan menjadi 67,82% tahun 2016. Kabar baik ini tentunya merupakan sumbangsih dari provinsi-provinsi yang ada di Indonesia.

Kemudian berdasarkan data OJK tahun 2016, dari 34 provinsi di Indonesia, tiga provinsi dengan indeks inklusi keuangan terbesar adalah DKI Jakarta sebesar 78,18%, DI Yogyakarta sebesar 76,73 dan Bali sebesar 76,00%. Sedangkan Provinsi Jawa Tengah hanya menduduki peringkat 21 dengan indeks inklusi keuangan sebesar 66,23%, hal ini menunjukkan bahwa financial inclusion index provinsi Jawa Tengah lebih rendah jika dibandingkan dengan financial inclusion index nasional sebesar 67,82 % hal ini memperlihatkan bahwa akses atau layanan keuangan di provinsi Jawa Tengah belum merata digunakan oleh masyarakat Jawa Tengah dan tentu saja aspek permodalan usaha belum tentu dapat disalurkan secara merata pula.

Ayuba & Zubairu (2015) menjelaskan bahwa perkembangan ekonomi suatu bangsa tentunya tidak luput dari peran usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) khususnya bagi negara Indonesia. Jumlah UMKM yang meningkat dari tahun ke tahun tidak terlepas dari faktor-faktor pendukungnya, salah satunya kredit UMKM sebagai penopang modal. Namun penyaluran kredit UMKM mengalami inkonsistensi dalam pertumbuhannya dari tahun ke tahun. Dengan adanya faktor-faktor yang seharusnya mampu meningkatkan penyaluran kredit UMKM salah satunya melalui peningkatan jumlah kantor, rekening kredit dan dana pihak ketiga (DPK), namun pertumbuhan kredit UMKM masih terbilang rendah

Kemudian jika kita melihat data dari Kementerian Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah, data jumlah UMKM binaan provinsi Jawa Tengah mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Hingga tahun 2016 jumlah UMKM binaan mencapai 115.201 unit dan pada triwulan III tahun 2017 mencapai 123.926 unit UMKM. Tentunya peningkatan jumlah UMKM ini diharapkan mampu memberikan kontribusinya sebagai penyokong perekonomian negara.

Peningkatan jumlah UMKM ini juga didukung dengan peningkatan kredit UMKM di Jawa Tengah, pada tahun 2016 mencapai Rp. 2.657.640.253.843 (OJK, 2017). Namun peningkatan penyaluran kredit ini justru belum maksimal karena adanya ketimpangan antar satu daerah dengan daerah lain di Jawa Tengah. Tentunya hal ini disuport dengan adanya akses UMKM terhadap jasa/layanan keuangan yang masih minim (Nu & Le, 2012), kemudian pada akhirnya akan berdampak pada tidak maksimalnya inklusifitas perbankan dan penyaluran kredit UMKM.

Selain penyaluran kredit UMKM yang belum merata dan masih terbilang rendah, perbedaan hasil penelitian yang telah dilakukan pun

menjadi latar belakang dari penelitian ini. Pasalnya, beberapa penelitian terdahulu mengenai inklusi keuangan dan kredit menghasilkan temuan yang tidak konsisten (Togba EL,2012; Quoc, et al,2012; Chakravarty & Pal, 2013; Li et.al, 2013; Jalil,2015; Allen,F et al, 2016; Sharma, 2016), sehingga perlunya melakukan pengujian lebih lanjut untuk mengetahui konsistensi temuan jika diimplementasikan pada lingkungan yang berbeda. Oleh karena itu tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui pengaruh beberapa indikator dari inklusi keuangan yaitu demographic branch penetration, geographic ATM penetration dan credit-account per capita terhadap penyaluran kredit UMKM di di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia.

#### **KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS**

Krisis ekonomi tahun 2008 yang berdampak pada krisis dikelompok in the bottom of pyramid yaitu kelompok berpendapatan rendah dan tidak teratur, tinggal didaerah terpencil, orang cacat, buruh yang tidak memiliki dokumen identitas legal dan masyarakat pinggiran. Yang disebut sebagai kelompok unbanked. Memunculkan adanya inklusi keuangan (financial inclusion). Financial inclusion sebagai sebagai salah satu upaya untuk memberikan kemudahan akses layanan keuangan kepada masyarakat. Oleh karena itu untuk meningkatkan keuangan inklusif di Indonesia disusun Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI). Dengan SNKI diharapkan mampu meningkatkan kapabilitas dan kualitas hidup dari kelompok the bottom of the pyramid serta membantu pengurangan kemiskinan (BI, 2017)

Salah satu cara pengukuran keuangan inklusif yaitu dengan menggunakan indeks keuangan inklusif (IKI). Pengukuran IKI merupakan upaya Bank Indonesia untuk mengkombinasikan berbagai indikator sektor perbankan yaitu menggabungkan informasi mengenai berbagai dimensi sistem keuangan yang inklusif yang dilihat

dari dimensi akses , dimensi penggunaan dan dimensi kualitas dari sebuah layanan perbankan.

Dimensi akses merupakan dimensi yang digunakan untuk mengukur kapabilitas pemanfaatan atau penggunaan jasa keuangan formal sehingga mampu meninjau adanya potensi hambatan ketika membuka dan menggunakan rekening bank seperti biaya atau keterjangkauan layanan jasa keuangan secara fisik misalnya kantor bank, ATM, dll. Parameter untuk mengukur dimensi akses antara lain demographic branch penetration, demographic ATM penetration, geographic branch penetration dan geographic ATM penetration (Beck et.al, 2007). Kemudian dimensi Usage, dimensi ini digunakan untuk mengukur kapabilitas pemanfaatan atau penggunaan produk dan jasa keuangan secara actual misalnya berkaitan dengan keselarasan, frekuensi dan lama penggunaan. Parameter dimensi akses antara lain : deposits-accounts per capita, credits-accounts per capita, credit-income ratio, deposits-income ratio. Dimensi yang terakhir adalah dimensi kualitas (quality). Dimensi ini menunjukkan level kualitas produk keuangan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Penelitian ini menggunakan dua teori yaitu optimal industry location theory dan teori perantara keuangan modern. Dalam teori lokasi industri optimal (Losch, 1954), dikatakan bahwa pemilihan tempat atau letak bisa mendasarkan pada cost dan sales capability. Losch (1954) juga menjelaskan bahwa pemilihan tempat atau letak seharusnya mendasarkan pada tujuan keuntungan perusahaan (profitability). Hal tersebut disebabkan karena ketika letak atau lokasi dan keuntungan, yang paling sesuai adalah jika memiliki minimum cost. Dalam teori ini juga dikenalkan variabel demand (permintaan) sebagai salah satu variabel yang sangat esensial dalam menentukan letak atau lokasi yang merujuk pada kapabilitas penjualan. Teori ini juga mengutamakan kemudahan akses

bagi konsumen misalnya dari segi distance dan transportation cost sehingga berpengaruh terhadap permintaan dan penjualan. Jika optimal industry location theory dikaitkan dengan sektor perbankan, maka branch office atau automatic teller machine (ATM) yang semakin dekat dengan nasabah atau konsumen, akan berdampak pada kemudahan akses dan peningkatan jumlah permintaan yang sekaligus akan meningkatkan pemanfaatan atau penggunaan layanan dan produk salah satunya kredit UMKM.

Dalam teori perantara keuangan modern (Andries, 2009), Andries telah mematahkan teori sebelumnya yang menjelaskan bahwa financial intermediaries menjual kembali aset yang mereka dapat, dalam hal ini aset yang dimaksud adalah dana pihak ketiga. Andries justru mengungkapkan bahwa financial intermediaries atau lembaga perantara keuangan menciptakan aset baru yang mereka pasarkan, dalam hal ini aset yang dimaksudkan adalah kredit. Dimana kredit ini nantinya akan menjadi account receivables (piutang). Dengan kata lain, bank sebagai salah satu financial intermediaries, maka semakin besar dana pihak ketiga yang dihimpun dari masyarakat akan memperbesar dana yang disalurkan (kredit) kepada masyarakat (kreditur/nasabah kredit).

### **Pengaruh Demographic Branch Penetration terhadap kredit UMKM**

Demographic branch penetration merupakan salah satu dimensi jangkauan dari inklusi keuangan, dimana mengukur jumlah cabang bank per 100.000 penduduk dewasa. Semakin besar demographic branch penetration menunjukkan bahwa semakin besar kemampuan bank menjangkau seluruh elemen masyarakat sehingga masyarakat mampu mengakses produk-produk perbankan khususnya kredit UMKM. UMKM dapat dengan mudah mengakses kredit modal kerja untuk kelangsungan bisnis mereka, sehingga jumlah penyaluran kredit UMKM juga

akan semakin besar. Hal ini sesuai dengan Optimal Industry Location Theory (Iosch, 1954) yang menyatakan bahwa perusahaan harus memiliki kemampuan atau kapabilitas produksi untuk memperoleh konsumen sebanyak-banyaknya. Artinya bahwa semakin jauh market atau pasar dari para konsumen maka konsumen akan enggan untuk melakukan pembelian disebabkan karena lokasi yang semakin jauh membuat biaya transportasi menjadi semakin mahal. Dengan kata lain, produsen hendaknya menentukan lokasi atau letak industri yang memiliki tempat yang cukup dekat dengan pasar sehingga konsumen mudah dalam mengakses dan perusahaan mampu mendapatkan keuntungan yang optimal. Teori ini tentunya selaras jika dikaitkan dengan industri perbankan bahwa semakin dekat lokasi perbankan maka masyarakat atau nasabah akan semakin mudah mengakses layanan perbankan khususnya layanan kredit perbankan. Penelitian yang dilakukan oleh Quoc, et al (2012), Chakravarty & Pal (2013), Allen, F et al (2016), dan Sharma (2016) juga mendukung dan menyatakan bahwa demographic branch penetration berpengaruh signifikan positif terhadap kredit UMKM. Sehingga dapat diajukan hipotesis sebagai berikut :

H1 : Demographic Branch Penetration berpengaruh positif terhadap kredit UMKM

### **Pengaruh Geographic ATM Penetration terhadap kredit UMKM**

Geographic ATM penetration merupakan salah satu dimensi jangkauan dari inklusi keuangan, dimana diukur dengan melihat jumlah ATM per 1000 km<sup>2</sup>. Semakin tinggi Geographic ATM penetration menunjukkan bahwa semakin besar ATM yang tersebar keseluruh daerah maka semakin banyak ATM didaerah yang diakses oleh masyarakat. UMKM dapat dengan mudah menjangkau ATM didaerah-daerah guna keperluan akses kredit modal kerja untuk kelangsungan

bisnis mereka. Hal ini sesuai dengan Optimal Industry Location Theory (Iosch, 1954) yang menyatakan bahwa perusahaan harus memiliki kemampuan atau kapabilitas produksi untuk memperoleh konsumen sebanyak-banyaknya. Artinya bahwa semakin jauh market atau pasar dari para konsumen maka konsumen akan enggan untuk melakukan pembelian disebabkan karena lokasi yang semakin jauh membuat biaya transportasi menjadi semakin mahal. Dengan kata lain, produsen hendaknya menentukan lokasi atau letak industri yang memiliki tempat yang cukup dekat dengan pasar sehingga konsumen mudah dalam mengakses dan perusahaan mampu mendapatkan keuntungan yang optimal. Teori ini tentunya selaras jika dikaitkan dengan industri perbankan bahwa semakin dekat lokasi perbankan maka masyarakat atau nasabah akan semakin mudah mengakses layanan perbankan khususnya layanan kredit perbankan. Penelitian yang dilakukan oleh Quoc, et al (2012), Togba EL (2012), Chakravarty & Pal (2013), Jalil (2015), Allen, F et al (2016), Sharma (2016) juga mendukung dan menyatakan bahwa Geographic ATM penetration berpengaruh signifikan positif terhadap kredit UMKM. Sehingga dapat diajukan hipotesis sebagai berikut :

H2 : Geographic ATM Penetration berpengaruh positif terhadap kredit UMKM

### **Pengaruh Credit account per capita terhadap kredit UMKM**

Credit account per capita merupakan salah satu dimensi financial inclusion yaitu dimensi penggunaan (usage) dimana diukur dari jumlah pinjaman per 1.000 penduduk. Semakin besar credit account per capita maka semakin banyak jumlah pinjaman yang disalurkan bank maka jumlah kredit UMKM akan semakin besar pula. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Quoc, et al (2012), Togba EL (2012), Chakravarty & Pal (2013), Jalil (2015), Allen, F et al (2016), dan Sharma

(2016) yang menyatakan bahwa credit account per capita berpengaruh signifikan positif terhadap kredit UMKM. Sehingga dapat diajukan hipotesis sebagai berikut :  
 H3 : Credit account per capita berpengaruh positif terhadap kredit UMKM

**METODE PENELITIAN**

**Variabel penelitian**

Terdapat dua variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu variable dependen berupa total kredit UMKM di Jawa Tengah (Y) yang merupakan logaritma natural dari jumlah kredit UMKM yang disalurkan, serta variabel independen yaitu Demographic branch penetration (X1) yang diukur dengan jumlah kantor bank dibagi dengan jumlah penduduk dewasa dan dikalikan 100.000, Geographic ATM Penetration yang diukur dengan jumlah ATM Bank per 1.000 km<sup>2</sup>, Credits accounts per capita (X3) yang diukur dengan jumlah rekening kredit dibagi dengan jumlah penduduk dewasa dan dikalikan 1.000.

**Penentuan sampel**

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu seluruh kota dan kabupaten di provinsi Jawa Tengah sejak tahun 2011-2016. Sampel diperoleh dengan menggunakan total sampling yaitu seluruh sampel digunakan dalam penelitian ini sehingga sampel yang digunakan sebanyak 35 kota dan kabupaten.

**Metode analisis**

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis regresi linear berganda. Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu jumlah kredit UMKM sebagai variabel Y dan tiga variabel independen sebagai variabel X yaitu demographic branch penetration (X1), geographic ATM penetration (X2) dan credit account per capita (X3), dengan formula sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Model regresi yang dibangun, akan dilakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan

melakukan uji kelayakan model menggunakan uji statistik F. langkah selanjutnya adalah dengan melakukan uji statistik t untuk uji hipotesis.

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**Deskripsi Objek Penelitian**

Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah yang dijadikan objek dalam penelitian ini selama periode pengamatan 2011-2016 sebanyak 35 kabupaten/kota. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Sentral Indonesia dan Badan Pusat Statistik (BPS). Penelitian ini menggunakan pooling data dimana jumlah sampel yang tersedia kemudian dikalikan dengan jumlah pengamatan sehingga diperoleh data sebesar 210 data (35x6).

**Pembahasan Hasil Penelitian**

Regression model yang dibangun dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda, namun model ini perlu di uji kelayakan model terlebih dahulu dengan uji asumsi klasik. Berdasarkan uji asumsi klasik, model regresi ini telah lolos uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Kemudian berdasarkan hasil uji statistic F yang menguji model regresi linear berganda apakah layak atau tidak, dapat dilihat pada tabel 1 sebagai berikut:

**Tabel 1. Hasil Uji Statistik F ANOVA<sup>a</sup>**

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	61.596	3	20.532	41.140	.000 <sup>b</sup>
Residual	99.815	200	.499		
Total	161.411	203			

a. Dependent Variable: Lnkredit

b. Predictors: (Constant), CA, GAP, DBP

Berdasarkan tabel 1 diatas menunjukkan bahwa didapat nilai f hitung sebesar 41,140 dan tingkat signifikansi 0,000 maka model regresi layak digunakan untuk memprediksi kredit UMKM. Kemudian pengujian hipotesis (uji t ) dapat dilihat pada tabel 2 berikut:

**Tabel 2. Hasil Pengujian Hipotesis (Uji t)**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
1 (Const)	27.509	.086			320.041	.000
DBP	-1.181	.653	-.235		-1.808	.072
GAP	.000	.000	.415		4.182	.000
CAC	.193	.042	.474		4.572	.000

a. Dependent Variable: Lnkredit

Sumber ; *Output* program SPSS Statistics

22 (data telah diolah)

Berdasarkan tabel 2 diatas menunjukkan bahwa variabel demographic branch penetration (DBP) memiliki t hitung sebesar -1,808, koefisien regresi -0,235 dengan arah negatif dan tingkat signifikansi 0,072. Dengan demikian hipotesis 1 ditolak. demographic branch penetration menunjukkan hasil yang tidak signifikan dan memberikan tanda negatif berarti naik turunnya demographic branch penetration dari periode ke periode sangat kecil sehingga tidak berpengaruh terhadap kredit UMKM. Hasil ini didukung oleh penelitian Li et.al (2013) dan Rahman & Widyarti (2017) yang menyatakan bahwa penetrasi demografis bank tidak berpengaruh signifikan terhadap Kredit UMKM. Kemudian tanda negatif menunjukkan bahwa dengan meningkatnya Demographic branch penetration menunjukkan bahwa jumlah bank yang semakin besar belum menjamin peningkatan jumlah kredit UMKM. Hal ini bisa disebabkan adanya peralihan media transaksi dengan teknologi, pasalnya saat ini terdapat program pengajuan kredit secara online ditambah dengan pengguna e-banking mencapai 270 persen pada periode 2012-2016 (OJK, 2017).

Variabel geographic ATM penetration (GAP) memiliki t hitung sebesar 4,182, koefisien regresi 0,415 dengan arah positif dan tingkat signifikansi 0,000. Dengan demikian hipotesis 2 diterima. Geographic ATM penetration

menunjukkan hasil yang signifikan dan memberikan tanda yang positif berarti naik turunnya geographic ATM Penetration dari periode ke periode sangat besar sehingga berpengaruh terhadap kredit UMKM. Tanda positif menunjukkan bahwa semakin tinggi penetrasi geografis ATM maka semakin tinggi pula penyaluran kredit UMKM. Kita ketahui bahwa penetrasi geografis ATM merupakan salah satu dimensi jangkauan dari inklusi keuangan, dimana diukur dengan melihat jumlah ATM per 1000 km<sup>2</sup>. Semakin tinggi Geographic ATM penetration menunjukkan bahwa semakin besar ATM yang tersebar keseluruhan daerah maka semakin banyak ATM didaerah yang diakses oleh masyarakat. UMKM dapat dengan mudah menjangkau ATM didaerah-daerah guna keperluan akses dana dalam menjalankan bisnis mereka. hal ini sesuai dengan Optimal Industry Location Theory (losch, 1954) yang menyatakan bahwa perusahaan harus memiliki kemampuan atau kapabilitas produksi untuk memperoleh konsumen sebanyak-banyaknya. Artinya bahwa semakin jauh market atau pasar dari para konsumen maka konsumen akan enggan untuk melakukan pembelian disebabkan karena lokasi yang semakin jauh membuat biaya transportasi menjadi semakin mahal. Dengan kata lain, produsen hendaknya menentukan lokasi atau letak industri yang memiliki tempat yang cukup dekat dengan pasar sehingga konsumen mudah dalam mengakses dan perusahaan mampu mendapatkan keuntungan yang optimal. Teori ini tentunya selaras jika dikaitkan dengan industri perbankan bahwa semakin dekat lokasi perbankan maka masyarakat atau nasabah akan semakin mudah mengakses layanan perbankan khususnya layanan kredit perbankan. Quoc, et al (2012), Togba EL (2012), Chakravarty & Pal (2013), Jalil (2015), Allen,F et al (2016), Sharma (2016), dan Rahman & Widyarti (2017) juga mendukung hasil tersebut dan menyatakan bahwa Geographic ATM penetration berpengaruh signifikan positif

terhadap kredit UMKM.

Credit Account per Capita (CAC) memiliki t hitung sebesar 4,572, koefisien regresi 0,474, dengan arah positif dan tingkat signifikansi 0,000. Dengan demikian hipotesis 3 diterima. Credit Accounts per Capita menunjukkan hasil yang signifikan dan memberikan tanda yang positif berarti naik turunnya Credit Accounts per Capita dari periode ke periode sangat besar sehingga berpengaruh terhadap kredit UMKM. Tanda positif menunjukkan bahwa semakin tinggi Credit Accounts per Capita maka semakin tinggi pula kredit UMKM. Credit account per capita merupakan salah satu dimensi inklusi keuangan, dimana diukur dari jumlah pinjaman per 1.000 penduduk. Semakin besar credit account per capita maka semakin banyak jumlah pinjaman yang disalurkan bank maka jumlah kredit UMKM akan semakin besar pula. Hal ini didukung dengan Modern financial intermediaries theory (Andries, 2009) yang menjelaskan bahwa di mana masyarakat dan/ atau pelaku bisnis yang mendapat saluran dana, yang berasal dari Dana pihak ketiga (DPK), merupakan nasabah kredit yang menjadi sasaran bagi perbankan guna menyalurkan kredit UMKM. Dukungan penelitian terdahulu dilakukan oleh Sharma (2016) dan Ghosh (2011) yang juga menyatakan bahwa variabel Credit Account per Capita memiliki pengaruh signifikan positif terhadap penyaluran kredit UMKM, dimana penggunaan layanan dan produk perbankan (menjadi nasabah kredit) dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang juga didukung dengan peningkatan kredit UMKM.

## **KESIMPULAN DAN KETERBATASAN**

### **Kesimpulan**

Penelitian ini memberikan hasil bahwa demographic branch Penetration memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap penyaluran kredit UMKM, geographic ATM penetration dan credit

account per capita memiliki pengaruh signifikan positif terhadap penyaluran kredit UMKM. Hal yang menarik dalam penelitian ini adalah demographic branch penetration yang diduga berpengaruh positif terhadap kredit UMKM justru memberikan hasil yang negatif, menunjukkan bahwa semakin banyak cabang bank disuatu wilayah ternyata jumlah kredit UMKM yang disalurkan semakin sedikit, begitupun sebaliknya. Dugaan adanya peralihan media transaksi dengan teknologi dengan munculnya program pengajuan kredit secara online dan jumlah pengguna e-banking yang meningkat secara signifikan pada tahun 2012-2016.

### **Keterbatasan**

Penelitian ini tentunya masih memiliki keterbatasan, dimana perlu dijadikan bahan pertimbangan untuk melakukan kajian yang lebih mendalam agar memperoleh hasil yang lebih baik dikemudian hari. Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini yaitu penelitian ini tidak menggunakan dimensi inklusi keuangan dengan lengkap sehingga perlunya variabel yang mewakili seluruh dimensi inklusi keuangan, kemudian penelitian ini hanya focus pada wilayah Provinsi Jawa Tengah sehingga akan memberikan hasil yang berbeda jika dilakukan di wilayah yang lain serta penelitian ini belum membandingkan kontribusi mana yang terbesar dari kabupaten atau kota di provinsi Jawa Tengah. Sehingga kedepan perlunya melakukan perluasan penelitian dengan menambah variabel baru misalnya menggunakan indikator dari dimensi akses dan penggunaan yang lebih lengkap, menambah dimensi kualitas, membandingkan wilayah kabupaten atau kota di Jawa Tengah untuk mengetahui kontribusi mana yang terbesar dalam penentuan kredit UMKM.

### **REFERENCES**

Allen, F., et.al. 2012. The Foundations of Financial Inclusion: Understanding



- Ownership and Use of Formal Accounts. Policy Research Working Paper.
- Andries, A.M. (2009). Theories regarding financial intermediation and financial intermediaries – a survey. *Annals of the Stefan cel Mare University of Suceava : Fascicle of the Faculty of Economics and Public Administration*, 9, 254-261.
- Ayuba, B., & Zulfairu, M. 2015. Impact of Banking Sector Credit on the Growth of Small and Medium Enterprises (SME's) in Nigeria, Vol. 15, 1-9
- Bank Indonesia. 2013. Evolusi Kerangka Kebijakan Financial Inclusion, November
- Bank Indonesia. 2014. Booklet Keuangan Inklusif 17
- Bank Indonesia. 2015. Profil Bisnis Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)
- Bank Indonesia. 2017. Indikator Keuangan Inklusif. Retrieved from <http://www.bi.go.id/id/perbankan/keuanganinklusif/indikator/kualitas/content/default.aspx>
- Beck, Thorsten & Demirguc-Kunt, Asli & Ross Levine, 2004. Finance, Inequality and Poverty. World Bank Policy Research Working paper 3338
- Beck, Thorsten & Demirguc-Kunt, Asli & Martinez Peria, Maria Soledad, 2007. "Reaching out: Access to and use of banking services across countries," *Journal of Financial Economics*, Elsevier, vol. 85(1), pages 234-266, July.
- Chakravarty, Satya R & Rupayan Pal. 2010. Measuring Financial Inclusion : An Axiomatic Approach. *Microeconomics Working Papers 22776*, East Asia Bureau of Economics research
- Chakravarty, Satya R & Rupayan Pal. 2013. Financial Inclusion in India : An Axiomatic Approach. *Journal of Policy Modelling*, Elsevier, Vol.35 (5) pages 813-837
- Darmawi, H. 2011. *Manajemen Perbankan*. Jakarta. Bumi Aksara
- Dienillah, A.A., & Anggraeni, L. 2016. Dampak Inklusi Keuangan terhadap Stabilitas Sistem Keuangan di Asia. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, Vol 18, 409-430
- Quoc, D., D'Haese, M., Lemba, J., Hau, L. L., & D'Haese, L. (2012). Determinants of household access to formal credit in the rural areas of the Mekong Delta, Vietnam. *AFRICAN AND ASIAN STUDIES*, 11(3), 261–287.
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang
- Leyshon, A., & Thrift, N. (1995). Geographies of Financial Exclusion: Financial Abandonment in Britain and the United States. *Transactions of the Institute of British Geographers*, 20(3), 312-341. doi:10.2307/622654
- Li, R., Li, Q., Huang, S., & Zhu, X. (2013). The credit rationing of Chinese rural households and its welfare loss: An investigation based on panel data. *China*
- Losch, A. (1954). *The Economic of Location*. New Jersey: New Haven.
- Nguyen, N. (2014). Credit Accessibility and Small and Medium Sized Enterprise Growth.
- Nu, P., & Le, M. (2012). What Determines the Access to Credit by SMEs? A Case Study in Vietnam. *Journal of Management Research*, 4(4), 90–115. <https://doi.org/10.5296/jmr.v4i4.1838>
- OJK. (2017). *Panduan Penyelenggaraan Kantor Digital Wujudkan Perbankan Digital di Indonesia*, 1–2.
- Rahman, M. I., & Widyarti, E. T. (2017). Analisis pengaruh pendapatan, pendidikan, suku bunga, penetrasi demografis dan geografis perbankan terhadap kredit umkm.
- Republik Indonesia. (1998). Undang-

- Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. [Www.Hukumonline.Com](http://www.hukumonline.com), 1–29.
- Rivai, dkk. 2010. Bank and Financial Institution Management Conventional & Sharia System. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada
- Sanjaya dan Nuursechafia. 2016. Inklusi Keuangan dan Pertumbuhan Inklusif : Analisis Antar Provinsi di Indonesia. Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan. Volume 18. Nomor 3. Januari
- Santoso, Singgih. 2004. SPSS Statistik Parametrik. Jakarta : Elex Media Komputindo
- Sarma, M. 2008. Index of Financial Inclusion. Working paper No.215, Indian Council For Research on International Economic Relations.
- Sarma, M., and J. Pais. 2008. Financial Inclusion and Development : A Cross Country Analysis Paper. Presented at The Conference on Equality, Inclusion and Human Development Organized by HDCA and IHD, New Delhi
- Sarma, M. 2012. Index of Financial Inclusion-A Measure of Financial Sector Inclusiveness. Berlin Working Papers on Money, Finance, Trade and Development, No.7. p 1-34
- Steelyna, E. 2013. Perempuan dan perbankan : sebuah tinjauan tentang peran inklusi keuangan terhadap pengusaha UMKM perempuan di Indonesia, 95-103
- Togba, E. L. (2012). Microfinance and households access to credit: Evidence from Côte d'Ivoire. Structural Change and Economic Dynamics, 23(4), 473– 486. <https://doi.org/10.1016/j.strueco.2012.08.002>